

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Peranan penting sektor pertanian dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menciptakan kesempatan kerja bagi orang-orang, menyediakan berbagai pilihan makanan, yang pada gilirannya mempengaruhi pola konsumsi dan gizi masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.¹ Peranan-peranan tersebut, membuat sektor pertanian memiliki kemampuan sebagai *leading sector*.

Sebagai negara agraris, dengan tanahnya yang dikenal dengan kesuburannya, tentu Indonesia menjadi negara yang mengandalkan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian negara. Bahkan pada saat pandemi COVID-19 melanda negeri, yaitu pada kuartal II 2020, sektor pertanian berhasil menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia dengan pencapaian 16,24% (q-to-q) dan secara *year on year* (y-o-y) sektor pertanian tetap berkontribusi positif, yakni tumbuh 2,19%.² Sektor pertanian berperan sebagai pilar ekonomi rakyat di pedesaan, menguasai kehidupan sebagian besar penduduk, menyerap lebih separuh total tenaga kerja dan bahkan menjadi katup pengaman pada krisis ekonomi Indonesia.³

¹ Ufira Isbah, dan Rita Yani Iyan, *Analisis Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian dan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau*, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Tahun VII No.19, November 2016, hlm. 46.

² TaniFund.com, *Sektor Pertanian Indonesia Besar Maknanya Bagi Bangsa Indonesia*, diakses dari <https://tanifund.com/blog/berita/makna-sektor-pertanian-untuk-indonesia>, pada 10 November 2022 pukul 23.10

³ Bustanul Arifin (2004), *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, dalam Ufira Isbah, dan Rita Yani Iyan *Analisis Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian dan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau*, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Tahun VII No.19, November 2016, hlm. 46.

Selain itu, pertanian tentu juga berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka permintaan akan produk pangan pun terus meningkat. Oleh karena itu, ketersediaan pangan harus dapat mengikuti peningkatan jumlah penduduk. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan keberpihakan kepada petani penting untuk menjadi skala prioritas. Karena pertanian memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan nasional dan dapat mencegah terjadinya krisis pangan, pengembangan sektor pertanian sebagai alternatif sumber penghasilan bagi petani harus terus dipertahankan.⁴

Dengan kontribusi yang besar bagi perekonomian dan ketahanan pangan nasional, pemerintah terus melakukan berbagai upaya pembangunan pertanian. Upaya yang dilakukan mulai dari pengolahan lahan, pemanfaatan bibit unggul, penggunaan teknologi baru, dan penyediaan pupuk untuk meningkatkan produktivitas pertanian sehingga mendapatkan hasil pertanian yang bermutu dan berkualitas. Pembangunan pertanian menjadi suatu bagian integral bagi pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan nilai tambah komoditi pertanian, yang kemudian akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan petani.⁵ Maka dari itu, pembangunan pertanian memiliki pengaruh yang besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagi petani, pupuk sangat menentukan dalam menjaga dan meningkatkan hasil pertanian. Namun, pupuk kerap kali sulit didapatkan di beberapa daerah serta harga yang dijual di pasaran pun cenderung mahal. Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada meningkatnya biaya pertanian. Berangkat dari kondisi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk distribusi pupuk bersubsidi agar seluruh petani, terutama petani kalangan menengah ke bawah, dapat memperoleh pupuk. Selain itu, melalui kebijakan pupuk bersubsidi ini, pemerintah juga memiliki tujuan agar terdapat

⁴ Muhammad Zid dan Ahmad Tarmiji A., *Sosiologi Pedesaan*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 148-151.

⁵ Asgami Putri, *Analisis Persepsi Petani Tanaman Hortikultura terhadap Program Bantuan Hortikultura di Kelurahan Agrowisata*, *Jurnal Agribisnis* Vol 20 No. 2 Desember 2018, hlm, 230.

harga yang konsisten di setiap kios pengecer pupuk untuk para petani. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari perbedaan harga pupuk, maka pemerintah juga menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020.

Tabel 1. 1 HET dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2021

Jenis Pupuk	Alokasi (Ton)	Harga
Urea	4.166.669	Rp2.250; per kg
SP-36	640.812	Rp2.400; per kg
ZA	784.144	Rp1.700; per kg
NPK	2.662.000	Rp2.300; per kg
NPK Formula Khusus	17.000	Rp3.300; per kg
Organik Granul	770.850	Rp800; per kg
Organik Cair	1.500.000	Rp20.000; per liter

Sumber: Permentan Nomor 49 Tahun 2020

Tabel di atas merupakan akumulasi jumlah alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia berdasarkan berbagai jenis pupuk. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa Urea merupakan jenis pupuk subsidi yang paling banyak mendapatkan alokasi yaitu sebanyak 4.166.669 ton, dan untuk yang paling sedikit NPK Formula Khusus yaitu hanya sebesar 17.000 ton. Berdasarkan Permentan Nomor 49 Tahun 2020 terdapat 7 jenis pupuk yang mendapat subsidi, namun saat ini sudah dikeluarkan kebijakan terbaru, yang tercantum di dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022, bahwa pupuk yang mendapat subsidi hanya berfokus pada jenis pupuk Urea dan juga NPK.

Sebagai wujud implementasi dari kebijakan pupuk bersubsidi, Kementerian Pertanian menggagas suatu program yang bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan Pemerintah Daerah yaitu Kartu Tani. Program ini merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi untuk penyimpanan, transaksi, penyaluran pinjaman, hingga kartu subsidi (*e-wallet*). Proses validasi berjenjang secara online, satu entri data, dan multifungsi adalah beberapa keunggulan Kartu Tani. Selain itu, Kartu Tani membantu Kementerian Keuangan dengan memastikan dana subsidi disalurkan secara transparan melalui sistem perbankan; membantu Pupuk Indonesia dengan

memberikan data kebutuhan pupuk yang akurat sampai ke tingkat pengecer; Bulog dapat menggunakan data pupuk yang disalurkan untuk memproyeksikan potensi panen di suatu wilayah; dan dinas pertanian dapat mengetahui produktivitas lahan di suatu wilayah.⁶

Bagi petani sendiri, selain berfungsi sebagai kartu ATM, Kartu Tani berisi kuota pupuk bersubsidi. Kartu Tani dapat dimiliki oleh petani yang sampai saat ini masih menyawah, baik buruh, maupun yang memiliki lahan, dengan luas sawah maksimal 2 hektar. Petani yang mendapatkan Kartu Tani didasarkan pada data dari Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang dikeluarkan oleh Kementan. Kebijakan e-RDKK berguna untuk memperketat penyaluran pupuk bersubsidi dalam rangka menghindari penyelewengan dan duplikasi penerima pupuk. Untuk penentuan jumlah kuota pupuk yang diinjeksi ke dalam Kartu Tani juga menyesuaikan luas lahan petani yang di-*input* ke dalam e-RDKK. Namun, bantuan subsidi melalui Kartu Tani tidak dapat diuangkan, hanya dapat digunakan untuk penukaran pupuk saja.⁷

Dalam kerja sama dengan Kementerian BUMN, program Kartu Tani melibatkan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang merupakan perusahaan induk milik BUMN dalam bidang pupuk di Indonesia.⁸ PIHC adalah perusahaan induk produsen pupuk bersubsidi beserta jaringan distributor yang ada di setiap kecamatan dan pengecer yang bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani. Distributor adalah orang atau badan usaha yang membeli pupuk bersubsidi dan non subsidi dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke retail atau kios. Sedangkan kios atau pengecer membeli pupuk bersubsidi dan non subsidi dari distributor, lalu

⁶ Pertanian.go.id, Kartu Tani, Era Baru Sejahteraan Petani Indonesia, diakses dari <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2067>, pada 10 November pukul 23.35

⁷ distan.bulelengkab.go.id, *Kebijakan e-RDKK*, diakses dari <https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/64-kebijakan-e-rdkk#:~:text=Sistem%20elektronik%20Rencana%20Definitif%20Kebutuhan,bersubsidi%202020%20s%20ekaligus%20meminimalisir%20penyelewengan.>, pada 10 November 2022, pukul 23.50

⁸ Wikipedia.org, *Pupuk Indonesia Holding Company*, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pupuk_Indonesia_Holding_Company, pada 11 November 2022 pukul 00.10

menjualnya ke petani, baik penerima Kartu Tani ataupun tidak. Petani penerima Kartu Tani harus membeli pupuk pada kios yang sudah ditentukan berdasarkan e-RDCK untuk mendapatkan pupuk dengan harga subsidi.

Selain itu, Kartu Tani sebagai program yang memberikan bantuan pupuk subsidi dalam bentuk kartu ATM atau kartu debit, menjalin kerja sama dengan pihak bank. Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Negara Indonesia (BNI) yang tergabung ke dalam Himpunan Bank-bank Negara (HIMBARA), bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam pencetakan Kartu Tani. Satu provinsi ditangani oleh pihak bank yang sama untuk pelaksanaan program Kartu Tani di seluruh kecamatan tersebut.⁹ Di sini pihak bank berperan sebagai pencetak Kartu Tani sekaligus bertanggung jawab untuk menyalurkan kepada para petani yang berhak menerima. Seperti halnya dengan Bank X yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program Kartu Tani di Provinsi Jawa Barat dan secara spesifik untuk Kabupaten Bekasi ditangani oleh Bank X Area Bekasi Juanda.

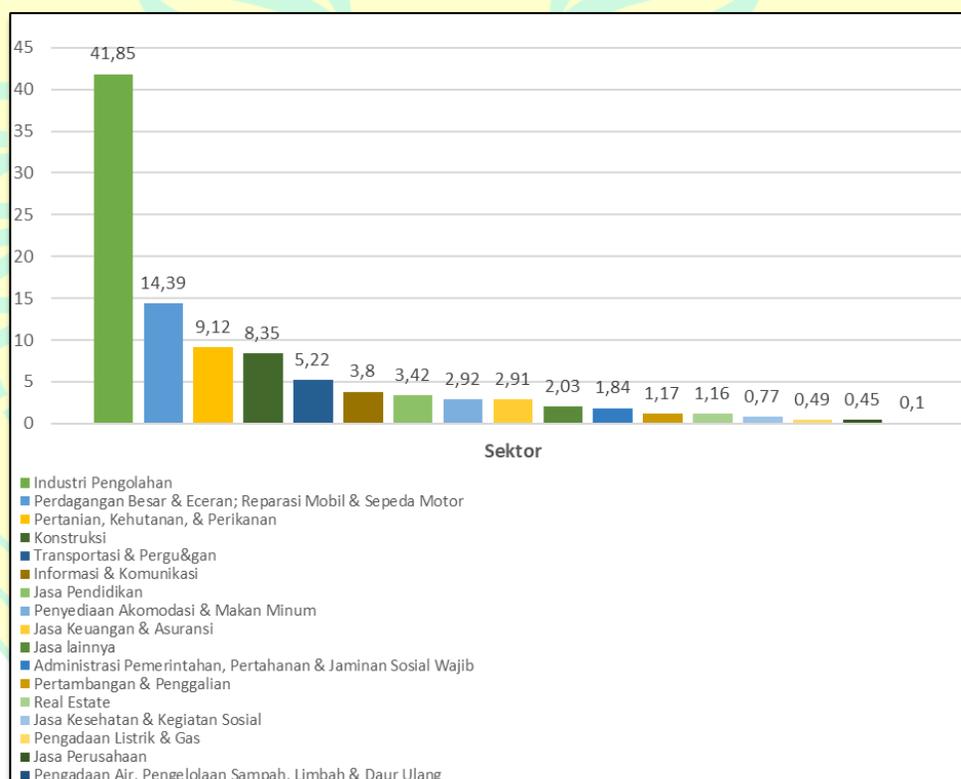
Program Kartu Tani, yang mulai dirintis pada tahun 2016 ini, dilaksanakan secara bertahap. Diawali dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan untuk nama-nama petani yang akan didaftarkan pada sistem e-RDCK. Pendataan tersebut dilakukan oleh pihak BPP yang ada di tiap-tiap kecamatan, di masing-masing provinsi, dan kemudian diteruskan kepada pihak Kementerian Pertanian. Pada tahun 2017, Kartu Tani mulai didistribusikan kepada petani yang sudah didaftarkan untuk wilayah Pulau Jawa, diantaranya yakni di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DI Yogyakarta. Pada 2018, program ini diperluas ke 10 provinsi di luar Pulau Jawa: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang masih cukup mengandalkan sektor pertanian. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS)

⁹ Pertanian.go.id, Kartu Tani, Era Baru Sejahterakan Petani Indonesia, diakses dari <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2067>, pada 11 November pukul 00.25

Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2022 triwulan III, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, memberikan kontribusi sebesar 9,12% terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat atas dasar harga berlaku. Sektor tersebut menduduki posisi ketiga, setelah sektor industri manufaktur (41,85%) dan sektor perdagangan besar dan eceran (14,39%). Walaupun memang Presentasenya cukup jauh jika dibandingkan dengan industri manufaktur, namun tentu kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak dapat diabaikan, yang jika dihitung, sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 56,2 Triliun Rupiah terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat.¹⁰

Gambar 1. 1 Grafik Distribusi PDRB Triwulan III atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Jawa Barat (Persen), 2022



Sumber: jabar.bps.go.id

¹⁰ jabar.bps.go.id, *PDRB Menurut Lapangan Usaha*, diakses dari <https://jabar.bps.go.id/subject/52/pdrb-menurut-lapangan-usaha.html#subjekViewTab3>, pada 12 Desember 2022 pukul 20.26

Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu daerah yang terletak di Jawa Barat, juga menjadikan pertanian sebagai salah satu sektor yang diandalkan. Berdasarkan informasi dari Kompaspedia, saat resmi menjadi kabupaten definitif pada tahun 1950, Bekasi merupakan lumbung padi yang menyuplai kebutuhan beras untuk penduduk di daerah Jawa Barat, bahkan hingga luar pulau Jawa. Sedangkan menurut data dari BPS Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2021, luas panen tanaman padi di Kabupaten Bekasi sebesar 100.338 hektar, dengan produksi tanaman padi sebanyak 587.586,10 ton, dan produksi berasnya sebesar 339.320,40 ton. Berdasarkan luas lahan dan hasil produksi, Kabupaten Bekasi menduduki posisi kelima setelah Indramayu, Karawang, Subang, dan Cianjur, jika dibandingkan dengan total 27 wilayah lainnya di Provinsi Jawa Barat.¹¹

Meskipun memang saat ini luas lahan dan jumlah petani sudah mengalami penurunan karena adanya pembangunan perumahan dan perindustrian, Kabupaten Bekasi masih memiliki potensi pada sektor pertanian sehingga pemerintah tetap berupaya menjamin pertumbuhan pertanian di sana dengan pelaksanaan program Kartu Tani. Pada sistem e-RDCK tahun 2022, terdapat 32.802 petani yang terdaftar di Kabupaten Bekasi. Dari 23 kecamatan yang ada, Tambun Selatan menduduki posisi paling bawah karena jumlah petani yang terdaftar paling sedikit dan memang luas lahan di sana juga sudah sempit. Petani yang terdaftar memang hanya berjumlah 96 orang pada e-RDCK 2022, namun mereka tetap mendapatkan perhatian, baik dari pihak Kementerian Pertanian, BPP setempat, dan terkhusus Bank X sebagai penyalur Kartu Tani.

¹¹ *jabar.bps.go.id, PDRB Menurut Kabupaten/Kota*, diakses dari <https://jabar.bps.go.id/subject/155/pdrb-menurut-kabupaten-kota.html#subjekViewTab3>, pada 12 Desember 2022 pukul 20.35

Tabel 1. 2 Jumlah Kartu Tani Kabupaten Bekasi (e-RDKK 2022)

Kecamatan	Jumlah Kartu
Babelan	1085
Bojongmangu	2328
Cabangbungin	2847
Cibarusah	1122
Cibitung	689
Cikarang Barat	309
Cikarang Pusat	548
Cikarang Selatan	220
Cikarang Timur	1745
Cikarang Utara	205
Karangbahagia	1591
Kedungwaringin	1320
Muara Gembong	1884
Pebayuran	4190
Serang Baru	1356
Setu	1397
Sukakarya	2514
Sukatani	1488
Sukawangi	2464
Tambelang	1739
Tambun Selatan	96
Tambun Utara	663
Tarumajaya	1002

Sumber: Dokumen Bank X (2022)

1.2. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dilihat bahwa Bank X merupakan salah satu pihak yang paling dekat dengan para petani karena tanggung jawabnya sebagai penyalur Kartu Tani yang mengharuskan untuk bersentuhan langsung dengan para petani. Tidak hanya sampai di situ, informasi mengenai program Kartu Tani sebagian besar diperoleh para petani melalui Bank X. Dengan demikian, terbentuknya interaksi Bank X dengan petani pun tentu tidak dapat terhindar. Interaksi yang efektif dan komunikasi yang baik sangat penting untuk dibangun antara Bank X dan petani di setiap wilayah agar tujuan dari program ini dapat tercapai.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui keberlangsungan program Kartu Tani di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan interaksi yang terjalin di antara Bank X Area Bekasi Juanda dan petani

penerima Kartu Tani. Untuk itu, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Kartu Tani oleh PT Bank X?
2. Bagaimana keberlangsungan program Kartu Tani dalam perspektif interaksionisme simbolik?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah:

1. Menguraikan pelaksanaan program Kartu Tani oleh PT Bank X.
2. Menguraikan Keberlangsungan program Kartu Tani dalam perspektif interaksionisme simbolik.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian studi ilmu sosiologi dan memberikan perspektif yang baru khususnya tentang kajian teori interaksionisme simbolik antar stakeholder dengan subjek sasaran dalam program bantuan sosial pupuk bersubsidi. Selanjutnya, untuk mengembangkan bidang sosiologi dan meningkatkan referensi tentang kajian sosiologi bahwa interaksi yang terjalin antara stakeholder dengan kelompok sasaran merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial pupuk bersubsidi karena melalui kedua unsur tersebut dapat tercipta kesepahaman antara kedua belah pihak yang dapat menentukan efektivitas terlaksananya program.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. **Bagi Pelaksana Program dan Stakeholder**, penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara mendalam mengenai manfaat maupun kendala yang dirasakan menurut pihak subjek sasaran atau penerima manfaat dari pelaksanaan program yang telah dilakukan, untuk pengembangan program ke depannya. Selain itu, diharapkan melalui penelitian ini, dapat dipahami bahwa interaksi dan komunikasi memiliki kedudukan yang penting bagi keberlangsungan program.
- b. **Bagi Masyarakat**, penelitian ini diharapkan memberi manfaat bahwa berupa pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan program Kartu Tani beserta manfaat dan kendala bagi pihak bank sebagai pelaksana dan bagi para petani penerima melalui interaksi yang terjalin di antara keduanya.

1.5. Tinjauan Literatur Sejenis

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, dibutuhkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Literatur yang dikutip memiliki relevansi dengan fokus bahasan peneliti. Berikut literatur yang digunakan:

Pertama yaitu disertasi oleh Berliana Prilli Nomita dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dengan judul “*Evaluasi Program Kartu Tani dalam Mengoptimalkan Distribusi Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah*”¹². Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan evaluasi tentang bagaimana Program Kartu Tani digunakan untuk mengoptimalkan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah serta memberikan gambaran mengenai strategi yang diambil oleh Dinas terkait dalam mengoptimalkan distribusi pupuk bersubsidi melalui Program Kartu Tani.

¹² Berliana Prilli Nomita, *Evaluasi Program Kartu Tani dalam Mengoptimalkan Distribusi Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah*, Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022

Metode semi-kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Peneliti memulai penelitian secara deduktif dengan metode kuantitatif. Kemudian, ketika analisis data mulai dimulai, desain diubah menjadi penelitian kualitatif, yang dilakukan secara induktif dengan melakukan analisis data secara mendalam. Observasi di lapangan, wawancara dengan informan, dan dokumentasi yang ada digunakan untuk mengumpulkan data. Analisis data dilakukan menggunakan teknik MDAP (Manual Data Analysis Procedure), yang merupakan teknik analisis data dengan pemrosesan data secara manual. Penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi William Dunn dan Langkah Evaluasi Suchmann.

Studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Program Kartu Tani di Kabupaten Banyumas telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor/11/Kpts/SR.310/B/03/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 mulai dari input RDKK menjadi eRDKK/Pengusulan Kartu Tani hingga penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani. Mulai tahun 2020, Kabupaten Banyumas sudah memberlakukan Kartu Tani sebagai alat transaksi penebusan pupuk subsidi bagi petani secara 100%. Kartu Tani menjadi solusi yang tepat bagi masalah distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Banyumas, hal ini terbukti dari meningkatnya angka penyerapan pupuk subsidi di Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan sebelum ada Program Kartu Tani.

Selain itu, masih ada beberapa hambatan yang menghalangi pelaksanaan Program Kartu Tani ini. Hambatan ini berasal dari dinas, petani, KPL, bank, dan distributor. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas mengambil berbagai langkah, seperti mewajibkan seluruh petani untuk menggunakan Kartu Tani saat membeli pupuk subsidi, memberikan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar aturan program Kartu Tani, memberikan opsi untuk meningkatkan mekanisme pelaksanaan Program Kartu Tani, dan memaksimalkan penggunaan Kartu Tani dengan melakukan upaya yang lebih baik.

Kemudian, Menurut kriteria evaluasi kebijakan William Dunn, program Kartu Tani Kabupaten Banyumas telah memenuhi semua kriteria evaluasi, termasuk efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan. Berdasarkan langkah evaluasi Suchman, Program Kartu Tani Kabupaten Banyumas adalah program yang tepat untuk mengoptimalkan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di Kabupaten Banyumas.

Kedua yaitu jurnal oleh Ahmad Abdurrahman Wahid, Siwi Gayatri, dan Kadhung Prayoga dari Universitas Diponegoro, dengan judul “*Problematika Implementasi Program Kartu Tani di Wilayah Kerja Balai Desa Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*”¹³. Jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan dan permasalahan dalam implementasi program kartu tani di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Wawancara mendalam, observasi lapangan, catatan lapangan, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif ini. Proses analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup penyajian, penarikan kesimpulan, dan reduksi data. Model implementasi George C. Edward (1980) digunakan untuk membahas masalah implementasi program kartu tani. Model ini mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Studi menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan program Kartu Tani di wilayah Kecamatan Bonang Kabupaten Deman telah dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku, masih ada hambatan teknis dan non-teknis di setiap fase implementasinya. Kompleksitas permasalahan dalam kartu tani tetap diupayakan untuk dicarikan penyelesaiannya oleh pelaksana kebijakan dan juga dengan peningkatan minat petani terhadap program.

¹³ Ahmad Abdurrahman Wahid, Siwi Gayatri, dan Kadhung Prayoga, *Problematika Implementasi Program Kartu Tani di Wilayah Kerja Balai Desa Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA), Volume 5, Nomor 3: 691-705, 2021

Problematika implementasi Kartu Tani di wilayah Kecamatan Bonang terdiri dari 4 variabel yang dibagi berdasarkan model implementasi George C. Edward III (1980). *Pertama* yaitu komunikasi, diketahui bahwa proses sosialisasi program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang belum optimal. *Kedua* yaitu sumber daya, diantaranya yaitu sumber daya manusia, informasi, wewenang, finansial, dan sarana prasarana. *Ketiga* yaitu disposisi, diketahui bahwa penyuluh merasakan adanya kompleksitas dalam permasalahan di lapangan sehingga berharap diadakannya evaluasi, kemudian juga pihak BRI mendukung program Kartu Tani hanya sebatas untuk menjalankan instruksi dari pimpinannya. *Keempat* yaitu struktur birokrasi, adanya pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang tidak menghambat secara signifikan implementasi kebijakan karena koordinasi terkait masalah Kartu Tani dilakukan secara langsung pada saat kunjungan lapangan maupun secara tatap maya melalui grup media sosial.

Ketiga yaitu jurnal oleh Rustinsyah dari Universitas Airlangga, yang berjudul “*Social Capital and Implementation of Subsidized Fertilizer Programme for Small Farmers: A Case Study in Rural Java, Indonesia*”¹⁴. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui fungsi program pupuk bersubsidi di desa yang dianggap sebagai contoh karena program mampu terlaksana dengan baik di sana. Penelitian ini juga ingin mengetahui peran yang dimainkan modal sosial terhadap pelaksanaan program dan cara modal sosial untuk meningkatkan efektivitas program.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan. Pertanyaan bersifat terbuka, tetapi fokus pada dua tema utama yaitu pengalaman masa lalu mereka terkait program pupuk bersubsidi dan harapan masa depan mereka untuk pelaksanaan program. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut tema dan kemudian diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan penelitian. Peneliti melakukan analisis menggunakan

¹⁴ Rustinsyah, *Social Capital and Implementation of Subsidized Fertilizer Programme for Small Farmers: A Case Study in Rural Java, Indonesia*, *International Journal of Rural Management* 11(1), 2015

teori Modal Sosial dalam tiga bentuk *bonding sosial capital*, *bridging sosial capital*, dan *linking sosial capital*.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa program pupuk bersubsidi dari pemerintah telah berhasil dilaksanakan dengan baik di Desa Pelem, Provinsi Jawa Timur dengan mengikutsertakan modal sosial. Ketiga bentuk modal sosial yaitu *bonding*, *bridging*, dan *linking sosial capital* semuanya telah dilaksanakan di desa Pelem dan terintegrasi ke dalam apa yang disebut dengan *hybrid sosial capital*.

Dalam bentuk *bonding sosial capital*, terlihat bahwa terdapat ikatan yang kuat antara petani dan antara anggota kelompok tani dan ketua kelompok tani, yang semuanya berada dalam satu kelompok yang homogen. Petani termotivasi untuk bekerja sama, mendukung, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program karena memberikan manfaat ekonomi, terutama dalam mengurangi biaya produksi mereka. Kemudian, dalam bentuk *bridging sosial capital*, para petani juga telah menjalin hubungan baik dengan mereka yang bukan petani, misalnya pedagang, pedagang, dan lain-lain untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari hasil panen mereka. Terakhir, dalam bentuk *linking sosial capital*, petani telah membangun hubungan baik dengan pejabat pemerintah, karena lembaga politik dapat membuat kebijakan untuk kepentingan petani.

Namun, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, meskipun keberhasilan program pupuk bersubsidi telah tercapai, masih terdapat ancaman akan terjadinya kegagalan kelak karena adanya beberapa masalah yang muncul dan memerlukan perhatian dari pemerintah. Masalah utamanya adalah hama dan penyakit yang menyerang hasil pertanian dan harga jual hasil pertanian yang fluktuatif. Menurut peneliti, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih terintegrasi, mulai dari tahap pra produksi hingga tahap distribusi, untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan pembangunan nasional.

Keempat yaitu jurnal oleh Qori Pebrial Ilham, Herry Purnomo, dan Tri Nugroho dari Institut Pertanian Bogor, dengan judul “*Analisis Pemangku Kepentingan dan Jaringan Sosial Menuju Pengelolaan Multipihak di Kabupaten Solok, Sumatera*

*Barat*¹⁵. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis kepentingan, dan pola hubungan para pihak yang terkait dalam pengelolaan KPHL Solok.

Data primer dan sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif ini. Data primer terdiri dari semua informasi tentang situasi masalah yang terjadi dalam pengelolaan hutan di KPHL Solok, para pihak yang terlibat, kepentingan, pengaruh, dan hubungan informasi mereka. Data primer dikumpulkan secara langsung dari sumber data pertama melalui wawancara menyeluruh dengan para pihak tersebut berdasarkan sejumlah pertanyaan kunci. Sedangkan, dokumen instansi, jurnal, dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan subjek penelitian digunakan sebagai data sekunder. Pada penelitian ini, Analisis stakeholders dan analisis jaringan sosial (AJS) dilakukan dengan UCINET 6.528 dan NetDraw 2.141.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan KPHL Solok, total 22 pihak, yang dapat dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan pengaruh dan kepentingan masing-masing. *Pertama, Key player*, ditempati oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Solok. *Kedua, Subject* merupakan KPHL Solok, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Batang Hari, BPDAS Agam Kuantan, dan BPDAS Indragiri Rokan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan dan kelompok masyarakat Nagari yang terdiri dari Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Musyawarah Nagari (BMN), Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN). *Ketiga, Context setter* yaitu BAPPEDA dan DPRD Kabupaten Solok, Dishutbun Provinsi Sumatera Barat, serta LSM KKIWarsi. *Keempat, Crowd* yaitu Bagian Hukum, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, Akademisi Universitas Andalas, penebang liar, dan pengusaha.

¹⁵ Qori Pebrial Ilham, Herry Purnomo, dan Tri Nugroho, *Analisis Pemangku Kepentingan dan Jaringan Sosial Menuju Pengelolaan Multipihak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat*, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI), Vol. 21 (2): 114-119, Agustus 2016

Peneliti menyatakan bahwa pola interaksi pihak-pihak di dalam jaringan pengelolaan KPHL Solok tidak tersebar merata. Akumulasi informasi dan pengetahuan hanya menumpuk pada pihak-pihak tertentu sehingga sebagian pihak tidak memiliki akses untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, pengelolaan hutan multipihak dapat menjadi alternatif model pengelolaan untuk menggabungkan kepentingan semua pihak dan mendistribusikan informasi secara merata untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kelima yaitu jurnal oleh Endro Gunawan dan Sahat Pasaribu dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian, dengan judul “*Persepsi Petani dalam Implementasi Program Kartu Tani untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi*”¹⁶. Penelitian ini membahas mengenai persepsi Kartu Tani mengenai Program Kartu Tani serta permasalahan dan faktor penghambat dalam pengimplementasian program tersebut.

Dengan menggunakan kuesioner terstruktur kepada petani yang telah menerima Kartu Tani dan *Focus Group Discussion* dengan pihak terkait (kios penyalur pupuk, pihak bank, dan Dinas Pertanian), peneliti mengumpulkan data primer dari survei dan wawancara. Uji kuantitatif dan kualitatif terhadap data yang dikumpulkan dilakukan, dan hasilnya disajikan dalam tabel analisis. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan *Weighted Average Index* (WAI), yang diukur dengan mempertimbangkan bobot dari setiap persepsi atau jawaban responden.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapati bahwa dalam pelaksanaan program, proses distribusi pupuk bersubsidi pemerintah masih membutuhkan beberapa penyesuaian bagi petani skala kecil. Hasil analisis *Weighted Average Index* menyimpulkan bahwa permasalahan implementasi kartu tani adalah: kesulitan dalam penggunaan (rumit), pemakaian kartu belum diwajibkan, kurangnya sosialisasi/penyuluhan oleh pemda, petani belum *bankable*, adanya tambahan biaya

¹⁶ Endro Gunawan dan Sahat Pasaribu, *Persepsi Petani dalam Implementasi Program Kartu Tani untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 28, No. 2, 2020

angkut dan kendala dalam mesin EDC. Dinas pertanian yang belum secara proaktif mengambil tindakan operasional yang taktis saat memulai program kartu tani, menjadi penyebab keterlambatan pelaksanaannya. Menurut peneliti, kelemahan ini perlu diatasi dengan inisiatif dukungan para pemangku kepentingan di tingkat wilayah.

Peneliti memberikan saran untuk perbaikan implementasi Kartu Tani kedepannya, diantaranya yaitu (1) Perlu sinkronisasi dan kesamaan pandangan terkait regulasi pelaksanaan kartu tani secara nasional; (2) Perlu adanya kerja sama dan koordinasi yang lebih intensif antara Bank, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam hal penyediaan dan validasi data pengguna kartu tani; dan; (3) Dinas Pertanian, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai penanggung jawab program, harus menunjukkan kreativitas dan dorongan yang kuat untuk mempercepat pelaksanaan program Kartu Tani.; (4) Perlu ada integrasi antara sosialisasi dan promosi program Kartu Tani sehingga dapat dilaksanakan secara rutin, terkendali, dan tepat sasaran; (5) Diperlukannya infrastruktur yang memadai, seperti jaringan telepon selular dan sinyal internet yang memadai, untuk mendukung aplikasi program Kartu Tani; (6) Perlunya jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi di kios pengecer; dan (7) Perlunya kemudahan dalam mendapatkan dan menggunakan kartu tani, sehingga dapat digunakan secara *massive*.

Keenam yaitu jurnal oleh Riki, Abdal, dan Wawan Setiawan Abdillah, yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021*”¹⁷. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat distribusi pupuk bersubsidi dari implementasi kebijakan program kartu tani di Kecamatan Pakisjaya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi/gabungan. Analisis data yang digunakan adalah model analisis Miles

¹⁷ Riki, Abdal, dan Wawan Setiawan Abdillah, *Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021*, *Journal of Law, Administration, and Social Science* Volume 2 No. 2, 2022

dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2017, p. 132) yang terdiri atas empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengestimasi kemampuan implementasi kebijakan melalui tujuh parameter: akses, cakupan, frekuensi, konsistensi, ketepatan layanan, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan.

Dalam menyelidiki implementasi kebijakan Program Kartu Tani untuk distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang pada tahun 2021, model implementasi kebijakan yang dibuat oleh Erwan Agus Purwanto (Purwanto, 2015, pp. 105–110) digunakan. Model ini menggunakan tujuh parameter. *Pertama*, Akses, Program Kartu Tani di Kecamatan Pakisjaya masih kurang baik dan sulit diakses karena mesin EDC sering mengalami *error*. *Kedua*, Cakupan, pendistribusian Kartu Tani belum mencapai 100%, namun program sudah berjalan dengan efektif. *Ketiga*, Frekuensi, Program Kartu Tani rata-rata dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun dan pendistribusian yang dilakukan setiap bulan sudah dapat mencukupi kebutuhan pupuk bagi petani. *Keempat*, Bias, tidak ada penyimpangan dalam distribusi pupuk dan penentuan target kelompok sasaran. *Kelima*, Ketepatan layanan, sudah hampir tepat atau tidak terlambat dilaksanakan. *Keenam*, Akuntabilitas, petani mendapatkan hak-haknya, seperti Kartu Tani, pupuk bersubsidi yang mencukupi, dan pelayanan keluhan petani oleh pihak penyuluh. *Ketujuh*, Kesesuaian program dengan kebutuhan, Program Kartu Tani menjadi jawaban untuk pendistribusian pupuk bersubsidi yang tertib dan melindungi hak subsidi para petani.

Ketujuh yaitu jurnal oleh Nur Mufidah dan Indah Prabawati, S. Sos, M. Si. dari Universitas Negeri Surabaya, dengan judul “*Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*”¹⁸. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana program

¹⁸ Nur Mufidah dan Indah Prabawati, *Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*, Publika 6 No. 9, 2018

penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani yang dilaksanakan di Desa Durung Bedug Candi, Sidoarjo.

Dalam penelitian ini, metode kualitatif deskriptif digunakan untuk pengumpulan data, yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dilakukan analisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memberikan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, disposisi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Prinsip 6 Tepat, yang terdiri dari jumlah, jenis, harga, lokasi, waktu, dan mutu, diperlukan untuk melaksanakan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah PPL dan pengurus kelompok tani di Kecamatan Candi dianggap cukup dari segi sumber daya manusia. Sedangkan kompetensi SDM para penerima Kartu Tani harus lebih ditingkatkan. Prinsip tepat harga telah sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam Permentan. Sejauh ini, tidak ada dana yang dialokasikan secara khusus untuk program Kartu Tani, yang merupakan hambatan dalam penyaluran dana. Karena keterlambatan stok ulang pupuk tidak pernah lebih dari 3 hari, waktu penyaluran pupuk bersubsidi tidak menimbulkan masalah. Meski demikian, waktu yang dibutuhkan untuk penyaluran dan penerbitan kartu terbilang panjang. Sementara untuk fasilitas pupuk bersubsidi utama telah dilaksanakan dengan baik dalam penyalurannya, karena sisa stok akhir sekitar 3% dari yang dialokasikan. Permasalahan yang muncul pada fasilitas lain adalah gangguan yang sering terjadi pada mesin EDC dan petani yang belum memiliki Kartu Tani.

Karakteristik agen pelaksana yang mendukung berjalannya program adalah sikap ulet, tulus, tanggap, dan bertanggung jawab. Beberapa pihak mengatakan bahwa keberlanjutan program harus dievaluasi kembali karena belum ada bukti yang menunjukkan bahwa itu efektif. Walaupun begitu, para pelaksana sudah memahami tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya, komunikasi antar organisasi para pelaksana yang terlibat telah berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Karena

pembagian fokus dan keterbatasan waktu, proses koordinasi menghadapi kesulitan dengan pihak BNI. Selain itu, kesuksesan program dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Dari ketiga faktor tersebut yang paling mempengaruhi adalah lingkungan ekonomi. Hal ini dikarenakan penerima manfaat program, yang sebagian besar adalah petani, tidak terbiasa menyimpan tabungan di bank, sehingga antusiasme petani rendah terhadap mekanisme baru ini.

Kedelapan yaitu jurnal oleh Vivi Vidyanita, Andy Fefta Wijaya, dan Siti Rochmah, dengan judul “*Kinerja Birokrasi dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Jombang*”¹⁹. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja birokrasi, faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik di Departemen Pertanian Jombang dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara mendalam, angket, dokumentasi, dan observasi. Peneliti menggunakan asas 6 tepat, yaitu tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat lokasi, tepat waktu, tepat harga, dan tepat sasaran, untuk menganalisis kinerja birokrasi dalam penyediaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Jombang.

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan selama penelitian mengenai Kinerja Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, peneliti menemukan bahwa tingkat responsivitas Dinas Pertanian Kabupaten Jombang terhadap masalah harga pupuk bersubsidi belum optimal. Kemudian, dari segi masalah ketepatan jumlah, Dinas Pertanian belum maksimal dalam mengontrol penggunaan pupuk kimia subsidi oleh petani. Akibatnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas Pertanian masih belum optimal. Selain itu, fokus perubahan di bidang teknologi oleh Dinas Pertanian tidak diimbangi dengan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan hal tersebut. Kemudian, orientasi pelayanan di Dinas Pertanian kurang

¹⁹ Vivi Vidyanita, Andy Fefta Wijaya, dan Siti Rochmah, *Kinerja Birokrasi dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Jombang*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 5, No. 1, 2016

efektif. Terakhir, kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi berasal dari rente birokrasi dan suap.

Kesembilan yaitu jurnal oleh Rajnarayan Gupta (Presidency University), Prasenjit Ghosh (Jadavpur University), dan Bipul Malakar (Jadavpur University), dengan judul “*Fertilizer Prices, Subsidy and Agricultural Prices: The Case of India*”²⁰. Penelitian ini berkonsentrasi pada sisi penawaran dan berfokus pada pengaruh harga pupuk terhadap harga pertanian. Pupuk, pada kenyataannya, merupakan input penting dalam sektor pertanian dan kepentingannya meningkat dari waktu ke waktu dengan penggunaan benih HYV (*High Yielding Varieties*). Oleh karena itu, hubungan sebab akibat dapat dijadikan hipotesis antara harga pupuk dan harga pertanian. Penelitian ini mengkaji apakah harga pupuk mempengaruhi harga pertanian di India.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Kajian dimulai dengan pengecekan stasioneritas deret yaitu Harga Pertanian (AP) dan Harga Pupuk (FP). Nilai logaritmik dari variabel telah dipertimbangkan untuk penelitian ini. Stasioneritas telah diperiksa dengan tes ADF (Augmented Dickey Fuller) dan PP (Phillips Perron). Kemudian dilakukan uji akar unit dengan menetapkan hipotesis nol $H_0: \rho = 0$ terhadap hipotesis alternatif $H_1: \rho < 0$ dan menggunakan statistik uji ADF. Sebaliknya, dalam uji PP, estimasi model sama dengan uji DF (Dickey Fuller), yang mengecualikan suku perbedaan lagged dari (1) dan (2) tetapi statistik uji berbeda dengan DF. Setelah memeriksa kestasioneran variabel, kausalitas diuji dengan memasang model VAR (Vector Auto Regressive) yang sesuai dan menjalankan uji-f yang relevan.

Berdasarkan penelitian, meskipun di India ada perlindungan pemerintah terhadap harga pupuk, namun harga pupuk tidak tetap, bervariasi dengan harga bahan baku. Kemudian, seiring berjalannya waktu, diketahui bahwa harga pupuk di India menunjukkan tren yang meningkat. Pergerakan harga pupuk ini pada gilirannya dapat memengaruhi pergerakan harga tanaman pertanian. Hubungan kausal seperti itu yang

²⁰ Rajnarayan Gupta, Prasenjit Ghosh, dan Bipul, *Fertilizer Prices, Subsidy and Agricultural Prices: The Case of India*, Malakar Review of Development & Change, Vol. XVII No.1, 2012, hlm. 41-51

diteliti oleh penulis. Studi ini, bagaimanapun, gagal mengidentifikasi kausalitas antara harga pupuk dan harga pertanian berjalan dari dua arah. Uji kausalitas Granger standar menegaskan bahwa harga pupuk tidak memandu harga tanaman

Hasil empirisnya mengejutkan dan mungkin disebabkan sebagian karena rendahnya penggunaan pupuk di dalam negeri dan sebagian lagi karena subsidi yang tinggi dari pemerintah. Lemahnya hubungan antara pupuk dan harga pertanian juga dapat disebabkan oleh penggunaan indeks harga grosir dan bukan harga eceran untuk kedua variabel tersebut. Namun, temuan studi tersebut bertentangan dengan sebagian besar literatur yang ada, yang menemukan harga pupuk sebagai salah satu faktor penentu harga pertanian yang signifikan. Studi ini lebih menyarankan untuk memeriksa peran biaya input lain seperti upah atau irigasi dalam memengaruhi harga barang-barang pertanian.

Tabel 1. 3 Tinjauan Literatur Sejenis

No	Nama Peneliti	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Berliana Prilli Nomita	Evaluasi Program Kartu Tani dalam Mengoptimalkan Distribusi Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah	Semi Kualitatif	Meskipun program Kartu Tani di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, masih ada beberapa hambatan dari dinas, petani, KPL, bank, dan distributor.	Penelitian ini menggunakan metode semi kualitatif dan berfokus pada evaluasi program. Sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dan menganalisis pelaksanaan program dengan teori interaksionisme simbolik
2.	Ahmad Abdurrahman Wahid, Siwi Gayatri, dan Kadhung Prayoga	Problematika Implementasi Program Kartu Tani di Wilayah Kerja Balai Desa Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak	Kualitatif	Meskipun program Kartu Tani telah dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku, masih ada hambatan teknis dan non-teknis di setiap fase implementasinya.	Penelitian ini berfokus menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan program menurut 4 variabel berdasarkan model implementasi George C. Edward III (1980) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Sedangkan

					peneliti, berfokus untuk melihat, pentingnya komunikasi antara bank dan petani bagi berlangsungnya program.
3.	Rustinsyah	<i>Social Capital and Implementation of Subsidized Fertilizer Programme for Small Farmers: A Case Study in Rural Java, Indonesia</i>	Kualitatif	Program pupuk bersubsidi telah berhasil dilaksanakan dengan baik di Desa Pelem, Provinsi Jawa Timur dengan mengikutsertakan modal sosial. Namun, masih terdapat ancaman akan terjadinya kegagalan kelak yaitu permasalahan hama dan penyakit yang menyerang hasil pertanian dan harga jual hasil pertanian yang fluktuatif.	Penelitian ini menganalisis implementasi program dengan teori modal sosial. Sedangkan peneliti menganalisis dengan teori interaksionisme simbolik.
4.	Qori Pebrial Ilham, Herry Purnomo, dan Tri Nugroho	Analisis Pemangku Kepentingan dan Jaringan Sosial Menuju Pengelolaan Multipihak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat	kualitatif	Terdapat banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan KPHL Solok. Pengelolaan hutan multipihak dapat menjadi alternatif model pengelolaan KPHL Solok untuk mengintegrasikan kepentingan para pihak dan mendistribusikan informasi secara merata.	Penelitian ini hanya berfokus pada pemangku kepentingan dan jaringan sosial dalam pengelolaan KPHL Solok. Sedangkan peneliti berfokus pada pelaksanaan program Kartu Tani dan tidak berfokus pada pemangku kepentingan dalam program, melainkan interaksi antara pihak bank sebagai salah satu stakeholder pelaksana program dengan petani sebagai kelompok sasaran.
5.	Endro Gunawan dan Sahat Pasaribu	Persepsi Petani dalam Implementasi Program Kartu Tani untuk Mendukung	Mix method (kualitatif dan kuantitatif)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor penting yang memengaruhi persepsi petani terhadap kartu tani adalah tidak adanya	Penelitian ini menggunakan metode campuran dan menganalisis persepsi petani dengan menggunakan Weighted Average Index (WAI).

		Distribusi Pupuk Bersubsidi		<p>sosialisasi program ini dengan baik dan adanya kesulitan dalam penggunaan kartu. Petani juga memberikan persepsi yang kuat terhadap adanya kepastian mendapatkan pupuk bersubsidi, dan kemudahan memperoleh pupuk bersubsidi dengan adanya kartu tani ini. Di sisi lain, petani mempunyai persepsi yang lemah terhadap penggunaan kartu tani ini.</p>	<p>Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan menganalisis dengan teori interaksionisme simbolik.</p>
6.	Riki, Abdal, dan Wawan Setiawan Abdillah	Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021	kualitatif	<p>Menurut tujuh indikator kinerja implementasi, BPP Pakisjaya telah melaksanakan program Kartu Tani dengan cukup baik. Ini ditunjukkan oleh distribusi pupuk bersubsidi yang merata, yakni hampir mencapai 100%.</p>	<p>Penelitian ini berfokus untuk menganalisis pelaksanaan program Kartu Tani berdasarkan 7 parameter yaitu akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Sedangkan analisis peneliti didasari pada interaksi yang terjalin antara Bank X dan petani menggunakan teori interaksionisme simbolik.</p>
7.	Nur Mufidah dan Indah Prabawati	Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo	kualitatif	<p>Di Desa Durung Bedug, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, program penyaluran pupuk bersubsidi telah dilaksanakan dengan baik. Namun, karena beberapa hambatan, pupuk masih tidak dapat ditebus dengan Kartu Tani.</p>	<p>Fokus dari penelitian ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, disposisi, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik.</p>

					Sedangkan penelitian berfokus pada implementasi program oleh pihak bank sebagai penyalur Kartu Tani beserta interaksinya dengan para petani dan peneliti menganalisis hal tersebut dengan teori struktural fungsional.
8.	Vivi Vidyanita, Andy Fefta Wijaya, dan Siti Rochmah	Kinerja Birokrasi dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Jombang	kualitatif	Dalam hal distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang, sistem birokrasi Departemen Pertanian Jombang masih kurang efektif. Beberapa masalahnya, termasuk harga pasar yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah, kios yang menjual pupuk kepada petani di luar wilayahnya, kebiasaan petani yang masih menggunakan pupuk secara berlebihan dan kefanatikan terhadap jenis pupuk tertentu, pungutan liar dari pejabat terhadap kios resmi, dan proses pendistribusian pupuk yang terlalu lama.	Penelitian ini berfokus menganalisis permasalahan dalam kinerja birokrasi Departemen Pertanian Jombang dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi. Sedangkan peneliti berfokus pada implementasi kebijakan pupuk subsidi melalui program Kartu Tani.
9.	Rajnarayan Gupta, Prasenjit Ghosh, dan Bipul Malakar	<i>Fertilizer Prices, Subsidy and Agricultural Prices: The Case of India</i>	kuantitatif	Meskipun di India ada perlindungan pemerintah terhadap harga pupuk, namun harga pupuk tidak tetap, bervariasi dengan harga bahan baku. Kemudian, seiring berjalannya waktu, diketahui bahwa harga pupuk di India menunjukkan tren yang	Penelitian ini berfokus pada harga pupuk dan pertanian. Sedangkan peneliti tidak terlalu berfokus pada harganya, melainkan implementasi dari program pupuk bersubsidi.

				meningkat. penelitian mengungkapkan bahwa harga pertanian tidak dipengaruhi oleh harga pupuk. Hasil	
--	--	--	--	---	--

Sumber: Diolah dari Tinjauan Penelitian (2023)



1.6. Kerangka Konsep

1.6.1. Program Kartu Tani

Telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat 2, bahwa penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani menggunakan Kartu Tani. Pada dasarnya, Kartu Tani berfungsi sebagai kartu debit yang dapat digunakan untuk mendapatkan pinjaman, tabungan, subsidi, dan bantuan yang menyertakan identitas petani. Kartu tani adalah basis data yang berisi informasi tentang petani seperti nama, nomor induk penduduk, dan alamat; luas lahan, komoditas, alokasi pupuk bersubsidi, kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotan), dan hasil panen.²¹ Kartu Tani diluncurkan oleh pihak perbankan bagi para petani yang sudah terdaftar dalam sistem e-RDKK untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) di kios atau pengecer resmi.

Pemerintah secara bertahap menerapkan Kartu Tani sejak 2017. Percobaan awal dilakukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, pada tahun 2018, dilakukan perluasan uji coba untuk provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan berita dari Kompas, pada tahun 2020, terdapat 13,9 juta petani yang terdaftar dalam e-RDKK, 9,3 juta Kartu Tani telah dicetak dan 6,2 juta kartu telah dibagikan. Namun, jumlah kartu yang digunakan baru mencapai 1,2 juta kartu, yang berarti hanya sekitar 19% dari total kartu yang telah terdistribusi. Padahal, ditargetkan bahwa pada tahun 2021, Kartu Tani berlaku sepenuhnya di seluruh wilayah Indonesia.²²

Mekanisme kerja Kartu Tani diawali dengan aktivasi kartu, yang sebelumnya sudah di-*input* dengan jumlah kuota pupuk bersubsidi (Urea dan NPK Phonska) oleh pihak bank penyalur. Kuota pupuk didasarkan pada luas lahan yang sudah tertera di

²¹ Endro Gunawan dan Sahat Pasaribu, *op.cit.* hlm. 133

²² *Ibid.* hlm. 13-14

dalam e-RDKK, berdasarkan input data yang dilakukan oleh pihak penyuluh setempat. Kemudian, pihak bank akan menyalurkan Kartu Tani untuk selanjutnya digunakan petani untuk menebus pupuk di kios yang sudah ditetapkan berdasarkan e-RDKK. Saat petani membeli pupuk, pihak kios hanya perlu menggesekkan kartu di mesin EDC karena Kartu Tani yang berfungsi sebagai kartu debit dapat diisi dengan uang deposit. Pada mesin EDC dapat terlihat jumlah jatah pupuk subsidi yang petani peroleh, kemudian petani dapat membeli pupuk sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan membayar sesuai dengan HET.²³

Jika dilihat secara umum, Kartu Tani merupakan program yang ditujukan bagi para petani, khususnya golongan menengah ke bawah. Program ini berupaya untuk mampu menjangkau setiap petani di seluruh Tanah Air untuk dapat terus mengembangkan usaha tani mereka dengan menyediakan komoditas pertanian yang esensial bagi petani. Dengan adanya program ini, tentu dapat sangat membantu petani dalam mengurangi biaya produksi karena harga pupuk bersubsidi cukup jauh dengan harga pupuk umumnya di pasaran.

Tabel 2. 1 Perbandingan Harga Pupuk Subsidi dan Non Subsidi Tahun 2022 (Per kg)

No	Jenis Pupuk	Harga Subsidi	Harga Non Subsidi	Selisih
1.	Urea	Rp2.250	Rp5.800	Rp3.350
2.	NPK Phonska	Rp2.300	Rp8.300	Rp6.000

Sumber: Tribunnews.com (2022)

Namun jika dilihat dengan lebih teliti, program yang digagas oleh Kementerian Pertanian ini mampu memiliki manfaat, tidak hanya bagi petani sebagai kelompok sasaran, tetapi juga berbagai pihak lainnya. Program ini lahir tidak hanya dari kebutuhan para petani tanah air akan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi

²³ Endro Gunawan dan Sahat Pasaribu, *op.cit.* hlm 134-135

juga sebagai sarana bagi para pihak-pihak terkait dalam memperoleh informasi dan data seputar pertanian.

Program Kartu Tani memberi manfaat bagi PT Pupuk Indonesia, diantaranya terkait data kebutuhan pupuk beserta sebaran wilayahnya, mempermudah manajemen stok dan perkiraan produksi pupuk, selain itu distribusi pupuk subsidi juga menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Kemudian, program ini berguna bagi BUMN *off taker* terkait informasi perkiraan jadwal panen, penyediaan gudang dan penanganan pasca panen, serta penyediaan anggaran serapan hasil panen. Selain itu, program ini juga bermanfaat bagi Kementerian Pertanian dan BUMN terkait kebutuhan database petani yang lebih akurat dan terintegrasi, luas lahan pertanian, penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, serta dalam membuat kebijakan pertanian.

Dalam implementasi program Kartu Tani terdapat keterlibatan dari berbagai pihak dengan perannya masing-masing. *Pertama*, melibatkan kementerian, diantaranya adalah Kementerian Pertanian dan Perekonomian. Kementerian Pertanian berperan dalam membuat kebijakan program Kartu Tani, menyediakan sistem e-RDKK, dan melakukan sosialisasi mengenai Program Kartu Tani kepada Dinas Pertanian dan pemerintah daerah. Sedangkan Kementerian Perekonomian bertanggung jawab dalam memfasilitasi koordinasi antar kementerian terkait dengan program Kartu Tani, seperti dengan Kemendagri.

Kedua, Dinas Pertanian/pemerintah daerah, bertugas untuk memberikan data petani penerima subsidi melalui sistem e-RDKK yang disediakan oleh Kementerian Pertanian kepada pihak-pihak terkait yang berhak memperoleh data, seperti pihak bank dan distributor pupuk. Kemudian, melakukan sosialisasi program Kartu Tani kepada petani sesuai dengan daerah jabatannya masing-masing. Selain itu, juga melakukan pendampingan dengan pihak bank dalam melakukan kegiatan pendistribusian Kartu Tani.

Ketiga, bank milik BUMN yang tergabung dalam HIMBARA, bertugas dalam mencetak Kartu Tani dan menginjeksikan kuota pupuk per petani sesuai data e-RDKK. Kemudian, melakukan distribusi dan sosialisasi program Kartu Tani kepada

petani bersama Dinas Pertanian. Lalu, bersama pihak distributor/Pupuk Indonesia, melakukan akuisisi Kios Pupuk Lengkap (KPL) menjadi agen bansos Kartu Tani dan melakukan sosialisasi program. Selain itu, juga menyediakan dashboard untuk *monitoring* penebusan pupuk bersubsidi.

Keempat, PT Pupuk Indonesia (Persero), bertanggung jawab dalam memberikan data KPL kepada pihak Bank dan Dinas Pertanian. Lalu, melakukan pendampingan akuisisi KPL menjadi agen bansos Kartu Tani bersama pihak bank. Kemudian, melakukan sosialisasi program Kartu Tani kepada produsen, distributor, dan kios agen pupuk. PT Pupuk Indonesia merupakan sosok yang berperan dalam menaungi pihak-pihak di bawahnya yang merupakan penyedia dan penyalur pupuk bagi petani, yaitu distributor dan kios agen.

Bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program Kartu Tani, mekanisme pelaksanaan program Kartu Tani diawali oleh Dinas Pertanian yang mempersiapkan data petani penerima Kartu Tani untuk kemudian di-*upload* ke sistem e-RDCK milik Kementerian Pertanian. Kemudian, bank akan menarik data e-RDCK sebagai dasar untuk pembukaan rekening dan pengisian alokasi pupuk bersubsidi per petani. Setelah itu, data petani akan diverifikasi melalui pengecekan dukcapil sebelum dibukakan rekening dan data alokasi pupuk menjadi acuan bagi bank untuk menginjeksi kuota pupuk subsidi dalam Kartu Tani. Setelah itu, Kartu Tani akan diserahkan ke cabang-cabang bank padanan untuk kemudian didistribusikan kepada petani bersama dengan dinas pertanian. Kemudian, kios agen melakukan *update stock* melalui sistem PIHC dari setiap pembelian pupuk subsidi yang dilakukan oleh petani penerima Kartu Tani.

Para petani yang telah terdaftar pada sistem e-RDCK akan mendapatkan Kartu Tani sebagai wujud fisik untuk dapat menebus pupuk bersubsidi. Kartu Tani dapat diperoleh oleh petani yang memiliki luas lahan kelolaan maksimal 2 hektar. Kartu Tani yang diberikan oleh pihak bank tidak berisikan saldo dalam bentuk uang, melainkan berisi kuota pupuk yang menyesuaikan dengan luasan lahan kelolaan petani. Jumlah pupuk Urea dan NPK yang didapat oleh petani per 1 hektar lahan masing-masing

adalah 2,75 dan 2,5 kuintal. Pada umumnya, petani mendapatkan kuota pupuk sebanyak dua hingga empat kali dalam setahun, tergantung pada musim tanam dan kebutuhan pupuk di setiap daerah. Penentuan jadwal dan jumlah kuota pupuk yang diberikan biasanya dilakukan oleh Dinas Pertanian setempat dan dapat berubah setiap tahunnya tergantung pada kebijakan pemerintah dan faktor-faktor lainnya seperti cuaca dan produksi tanaman.

Petani yang telah memperoleh Kartu Tani harus membawanya ke kios agen bansos Kartu Tani pada saat hendak menebus pupuk bersubsidi. Pihak kios akan memproses transaksi pembelian pupuk dengan menggesekkan Kartu Tani pada mesin EDC. Petani dapat menentukan berapa jumlah pupuk yang ingin ditebusnya dan juga dapat melihat sisa kuota pupuk yang dimilikinya pada mesin EDC. Kartu Tani memang menjadi syarat bagi para petani untuk dapat menebus pupuk, namun jika memang petani sudah terdaftar pada sistem e-RDCK tetapi Kartu Tani belum diperoleh, petani dapat menebus pupuk dengan menunjukkan KTP dan pihak kios akan mencatat transaksi pembelian secara manual.

Pada saat pendistribusian Kartu Tani kepada para petani, mereka tidak hanya mendapatkan kartunya, tetapi juga akan memperoleh buku tabungan beserta dengan *pin mailer* atau pin ATM yang sudah disediakan oleh pihak bank. Oleh karena itu, Kartu Tani tidak hanya dapat digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi, namun dapat pula difungsikan selayaknya kartu debit untuk melakukan berbagai transaksi seperti menyimpan dana, transfer, dan transaksi pembayaran lainnya. Jadi dengan memperoleh Kartu Tani, petani juga dapat mulai memahami terkait cara bertransaksi dan menabung di era yang sudah lebih modern melalui sistem perbankan.

Kartu Tani dapat berfungsi maksimal sebagai kartu debit, namun ada beberapa perbedaan dan kekhususan yang dimilikinya. Terdapat beberapa fitur Kartu Tani yang tersedia, diantaranya adalah bebas minimum saldo rekening, bebas biaya administrasi bulanan, serta bebas setoran awal dan setoran berikutnya, sehingga setiap petani tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk memperoleh Kartu Tani dan selama memiliki Kartu Tani. Kemudian, Kartu Tani memberikan kemudahan dalam bertransaksi tanpa

harus ke kantor cabang bank, melainkan dapat mengunjungi kios agen. Selain itu, Petani juga dapat memperoleh bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu, Kartu Tani sudah dijamin oleh Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS)

Selain itu, petani pemegang Kartu Tani yang memenuhi syarat, berhak mendapat fasilitas KUR Tani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data petani yang sudah tersimpan pada sistem e-RDCK nantinya dapat digunakan untuk verifikasi data pada saat petani mengajukan KUR ke bank. Petani dapat mengajukan KUR untuk mendapatkan pinjaman guna membiayai kegiatan pertanian mereka, seperti pengadaan bibit, pupuk, pestisida, alat pertanian, dan lain sebagainya. Syarat dan ketentuan mengenai KUR bagi petani penerima Kartu Tani dapat bervariasi tergantung pada kebijakan bank yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program KUR tersebut. Namun, pada umumnya, petani yang ingin mengajukan KUR harus terdaftar sebagai penerima Kartu Tani, memiliki usaha pertanian yang legal, memiliki rekening bank, serta mampu membuktikan kemampuan untuk melunasi pinjaman dengan mengajukan proposal usaha dan dokumen pendukung lainnya.

1.6.2. Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan petani dan dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Kebijakan pupuk bersubsidi tertuang di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dengan adanya peraturan tersebut, pupuk bersubsidi dapat terjamin ketersediaan dan harganya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang merupakan harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri.²⁴

²⁴ psp.pertanian.go.id, *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021*, diakses dari <https://psp.pertanian.go.id/storage/889/Permentan-Nomor-41-Tahun-2021.pdf>, pada 11 November 2022 pukul 13.15

Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pembagian pupuk di masing-masing wilayahnya dikeluarkan atas dasar Peraturan Menteri tersebut. Keputusan-keputusan ini membantu produsen, distributor, dan penyalur pupuk di Lini IV untuk menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya. Penyaluran pupuk bersubsidi khusus bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luas lahan maksimal 2 hektare setiap musim tanam. Selain itu, petani yang menerima pupuk subsidi harus terdaftar dalam sistem e-RDCK dan bergabung dalam Kelompok Tani.

Pupuk bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri, yang produksi dan/atau pengadaannya dilakukan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero). Pupuk yang disubsidi terdiri dari pupuk an-organik dan pupuk organik. Untuk pupuk an-organik yang disubsidi oleh pemerintah, diantaranya terdiri dari urea, Super Phospat kandungan P_2O_5 36% (SP-36), Zvavelvuure Ammonium (ZA), serta Nitrogen, Phospat, dan Kalium (NPK).

Namun, semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022, terdapat beberapa perubahan terhadap jenis, peruntukan, dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi. Kalau sebelumnya terdapat 4 jenis pupuk yang disubsidi, kini hanya 2 jenis yaitu Urea dan NPK Phonska. Kemudian, untuk jenis peruntukannya, pada peraturan ini lebih dirinci usaha tani dari setiap subsektor yang ada, seperti misalnya untuk subsektor tanaman pangan, dikhususkan untuk usaha tani padi, jagung, dan kedelai. Lalu, untuk penetapan alokasi terdapat beberapa perubahan pada susunan dan poin dari pasal-pasalannya, seperti misalnya pada penetapan alokasi tingkat pusat, yang mempertimbangkan data spasial lahan petani, sedangkan pada peraturan sebelumnya tidak disebut demikian.

1.6.3. Teori Interaksionisme Simbolik

Interaksionisme simbolik merupakan perspektif yang fokus tatanannya berada pada skala mikro. Berbeda dengan perspektif berskala makro yang melihat pada cakupan masyarakat yang lebih luas seperti dalam kelompok atau sistem sosial, perspektif ini lebih menekankan pada hubungan antar individu. George Herbert Mead melakukan analisis tindakan dengan memfokuskan perhatiannya pada stimulus dan respon.²⁵ Mead menginginkan perilaku individu ditempatkan pada cakupan yang lebih luas dan kompleks, sehingga perilaku individu tersebut tidak sesederhana pandangan John B. Watson yang memformulasikan perilaku individu hanya sebatas stimulus-respons yang bersifat manifest atau sekadar perilaku yang tampak, melainkan melibatkan proses mental, kesadaran aktor, dan akal (*mind*). (hal 92)²⁶

Dalam memahami interaksionisme simbolik, Mead menjabarkan 4 tahapan dalam tindakan sosial individu, yang terdiri dari *Impuls* yaitu dorongan hati, *Persepsi* yaitu penafsiran individu terhadap suatu objek, *Manipulasi* yaitu proses ketika individu mengambil keputusan terhadap suatu tindakan, dan *Konsumsi* yaitu suatu tindakan yang dilaksanakan setelah melalui 3 tahapan sebelumnya.²⁷ Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu tidak dilakukannya hanya sekadar spontanisme, tetapi melalui proses pemikiran dan penafsiran terlebih dahulu. Setiap individu dapat memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap satu objek yang sama dan dengan perbedaan penafsiran tersebut dapat saling memberikan pengaruh antar individu yang satu dengan yang lainnya saat mereka melakukan interaksi.

Perspektif interaksi simbolik berasal dari perspektif yang lebih luas, yaitu perspektif fenomenologis. Fenomonologi digunakan oleh Maurice Natanson sebagai istilah yang mengacu pada semua pandangan ilmu sosial yang berpandangan bahwa

²⁵ Ari Cahyo Nugroho, *Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)*, Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, Vol. 2 No. 2. Desember 2021, hlm. 191

²⁶ Umiarso Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik hingga Modern*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 92

²⁷ Perspektif sosiologi, Teori Interaksionisme Simbolik: George Herbert Mead [Video], diakses dari <https://youtu.be/LSIJGKF4SiA> pada 28 Maret 2023 pukul 13.005

tindakan sosial dapat dipahami apabila kita terlebih dahulu fokus pada kesadaran manusia dan makna subjektifnya.²⁸

Perspektif interaksionisme simbolik menilai bahwa perilaku manusia harus dipahami dari sudut pandang subjektif yang berarti manusia adalah makhluk yang aktif serta bertindak berdasarkan apa yang mereka percaya dan tidak sebatas pada makna yang sudah ditentukan atas suatu objek atau yang bersifat objektif. Perilaku individu dipilih sebagai hal yang layak dilakukan berdasarkan cara mereka menafsirkan suatu situasi dan bukan berasal dari faktor eksternal atau melalui proses mekanis, melainkan lebih bergantung dari bagaimana individu mendefinisikan sesuatu yang mereka alami.²⁹

Interaksionis simbolik mengalihkan perhatiannya pada interpretasi sudut pandang subjektif dan bagaimana individu memahami dunia berdasarkan perspektif uniknya masing-masing. Perspektif ini seringkali kurang memerhatikan struktur objektif dan lebih berfokus pada makna subjektif. Interaksionisme simbolik menjauh dari perspektif yang mungkin memberikan pandangan yang terlalu disosialisasikan terhadap individu karena ia memahami individu sebagai agen, otonom, dan integral dalam menciptakan dunia sosial mereka sendiri.³⁰ Oleh karena itu, perspektif ini meyakini bahwa diri sang aktor sendiri yang mendefinisikan objek fisik dan non fisik berdasarkan pada sisi "kegunaan" dan "tujuannya".

Meskipun individu bertindak secara aktif dan berdasarkan apa yang mereka tafsirkan terhadap situasi tertentu, namun konsep diri individu secara signifikan tetap menekankan pentingnya respons orang lain yang ditafsirkan secara subjektif sebagai sumber data primer mengenai dirinya. Sesuatu tentang dirinya yang diinternalisasikan sebagai milik individu berasal dari informasi yang ia terima dari orang lain. Hal itu mengacu pada citra diri mental yang dihasilkan dari mengambil peran aktor lain

²⁸ Ari Cahyo Nugroho, *loc. cit.*

²⁹ Umiarso Elbadiansyah, *op.cit.* hlm. 196

³⁰ Michael J Carter dan Celene Fuller, *Symbols, meaning, and action: The past, present, and future of symbolic interactionism*, Sage Publication, Volume 64, Issue 6, hlm. 2

sehingga pada batas tertentu diri sang aktor akan berpikir sebagai aktor lain yang berpikir dan melihat diri sang aktor sendiri. Oleh karena itu, diri tidak cukup ditemukan hanya melalui introspeksi diri secara pribadi, tetapi melalui pengambilan peran orang lain dan membayangkan mengenai bagaimana diri mereka dilihat dari sudut pandang aktor lain.³¹

Menurut Mead, antara *mind*, *self*, dan *society*, terjadi proses dialektis di dalam kerangka proses sosial diri sang aktor, meski pada akhirnya baginya, masyarakat memang mendahului pikiran individu baik secara logis maupun temporal. Meski begitu, dalam proses ini Mead tetap mengedepankan analisis *taking the role of the other* dalam proses sosialisasi untuk melahirkan suatu tindakan sosial. Untuk mencoba memahami apa yang diharapkan oleh pihak lain, seorang "diri" akan membayangkan dirinya dalam posisi orang lain sebelum melakukan tindakan.³² Jadi meski manusia merupakan makhluk yang dapat secara bebas untuk menentukan tindakan mereka, namun tindakan yang ditunjukkan tidak semata-mata lahir tanpa berbagai pertimbangan, seperti melalui penafsiran mereka terhadap suatu situasi dan melalui asumsi pandangan orang lain terhadap mereka melalui pengambilan peran orang lain yang dilakukannya.

Pengambilan peran aktor lain dan melihat penilaian aktor lain terhadap dirinya dapat dilakukan melalui interaksi dan komunikasi. Esensi dari perspektif interaksionisme simbolik terletak pada komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna sebagai ciri khas manusia. Simbol yang dimaksud adalah objek sosial yang digunakan untuk menampilkan apa pun yang disepakati oleh antar individu atau aktor yang berinteraksi untuk ditampilkan. Interaksionisme simbolik memberikan asumsi dasar bahwa setiap individu bertindak atas dasar makna yang mereka miliki dan yang muncul selama proses interaksi sosial antar aktor.³³ Jadi perilaku aktor tidak dapat ditentukan hanya sebatas pada kebutuhan, dorongan impuls, tuntutan budaya, atau

³¹ Umiarso Elbadiansyah, *op.cit.* hlm. 202

³² Umiarso Elbadiansyah, *op.cit.* hlm. 205

³³ Umiarso Elbadiansyah, *op.cit.* hlm. 186

tuntutan peran, melainkan berdasarkan penafsiran mereka terhadap objek-objek di sekeliling mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa pikiran (*mind*) dan diri (*self*) menjadi bagian dari perilaku manusia.³⁴

Terdapat varian penting yang mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap diri (*self*) sang aktor terutama pada kondisi saat antar individu yang satu dengan yang lainnya menjalin sebuah hubungan atau interaksi. Pada keadaan tersebut, terjadi proses *verstehen* yaitu memahami, merasakan, mencari tahu, dan memahami sifat, serta pentingnya fenomena, terutama untuk memahami makna dengan penafsiran terhadap simbol yang dinyatakan oleh diri aktor lain. Oleh sebab itu, proses *verstehen* atau interpretasi yang menjadi penengah antara stimulus dan respons menempati posisi kunci dari interaksionisme simbolik. Diri sang aktor akan cenderung memunculkan penilaian moral tentang tindakan beserta dengan emosi yang mendasari manusia lainnya. Melalui proses tersebut, terbentuk proses dialektika antara diri sang aktor lain yang pada gilirannya membentuk suatu tatanan realitas sosial yang biasa disebut sebagai proses sosial.³⁵

Sebuah simbol dapat dikatakan memiliki kategori yang *urgent* ketika ia menimbulkan dampak, respon, atau perubahan yang signifikan pada penggunaannya. Simbol yang memiliki relevansi paling kuat dengan diri sang aktor adalah simbol yang tersusun dalam suatu bahasa (kata-kata atau istilah) yang umum digunakan oleh sang aktor. Mead mengatakan bahwa perkembangan diri aktor bergantung pada komunikasi antara dirinya dengan aktor lain, khususnya dengan sejumlah kecil aktor penting (*significant other*) yang memberikan pengaruh pada diri sang aktor sebagaimana diri sang aktor penting itu juga dipengaruhi oleh sang aktor.³⁶ Pengaruh yang didapat dari kedua aktor itu timbul karena adanya komunikasi 2 arah yakni aktor yang berperan sebagai komunikator tidak serta merta mengendalikan komunikasi yang terjadi karena

³⁴ Umiarso Elbadiansyah, *op.cit.* hlm. 189-190

³⁵ Umiarso Elbadiansyah, *op.cit.* hlm. 190

³⁶ Umiarso Elbadiansyah, *op.cit.* hlm. 216

simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi tersebut mempunyai isi makna dan nilai dari pihak yang hadir.³⁷

Fakta bahwa antar aktor menyadari kehadiran satu sama lain, menciptakan pengaruh yang hidup serta perilaku yang dipastikan bersifat sosial dan kolektif. Melalui interaksi sosial, terbentuk perilaku kolektif yang merupakan perilaku individu di bawah pengaruh dorongan yang umum dan kolektif. Dalam analisis Blumer mengenai perilaku kolektif, ia meninjau bahwa biasanya manusia menanggapi satu sama lain dan kemudian bereaksi atas dasar interpretasi mereka. Maka dari itu, tanggapan tidak dilakukan secara langsung terhadap rangsangan, melainkan berlangsung setelah proses interpretasi. Lebih lanjut, tindakan mereka cenderung berbeda sifatnya dari tindakan yang merangsang, yang pada dasarnya merupakan penyesuaian terhadap tindakan.³⁸

Makna yang mendasari tiap tindakan individu merupakan sesuatu yang bersifat inter-subjektif dan dirasakan, serta terus-menerus ditafsirkan ulang di antara individu. Tidak ada makna yang melekat secara permanen pada orang atau objek yang dihadapi aktor. Seiring dengan meningkatnya intensitas interaksi dan komunikasi antar aktor, maka makna yang dimiliki tiap aktor terhadap situasi yang ada dapat mengalami perubahan secara terus menerus, yang kemudian tercermin pada perilaku yang ditunjukkannya. Perilaku merupakan cara istimewa seorang aktor untuk bereaksi terhadap interpretasi mereka terhadap suatu situasi dan bukan sebagai bahan untuk memeriksa atau memprediksi mengenai pengetahuan anteseden tentang bagaimana umumnya aktor menanggapi situasi tertentu. Dalam memahami perilaku sosial, dibutuhkan perspektif interpretatif yang mengkaji bagaimana perilaku berubah, tidak dapat diprediksi, dan unik dalam setiap pertemuan sosial.³⁹

Menurut Deddy Mulyana, makna yang seorang individu berikan terhadap suatu objek berasal dari interaksi sosial dan sifatnya tidak tetap atau dapat berubah selama

³⁷ Umiarso Elbadiansyah, *op.cit.* hlm. 218

³⁸ Robert E. Park dan Ernest W. Burgess (1921), 'Introduction to the Science of Society', dalam Raffaele Rauty, *Remarks on Blumer, Symbolic Interactionism and Mass Society*, Italian Sociology Review, Vol. 9, No.2, hlm. 177

³⁹ Michael J Carter dan Celene Fuller, *op.cit.* hlm. 3

interaksi tersebut berlangsung. Dalam konteks ini, perspektif interkasionisme simbolik menekankan pentingnya peran bahasa terhadap perilaku manusia. Interaksi memang dianggap ditentukan oleh aturan, norma, dan arahan, namun hasilnya tidak selalu dapat diramalkan atau ditentukan di awal.⁴⁰ Hal tersebut berkaitan dengan inti dari perspektif interaksionisme simbolik yang berfokus mempelajari hakikat interaksi sebagai aktivitas sosial manusia yang dinamis dan terus berkembang. Interaksi antar individu dilihat oleh fenomenologi Alfred Schutz sebagai faktor penting yang menentukan perilaku manusia, bukan berdampak pada struktur masyarakat. Dengan demikian, struktur masyarakat dapat diciptakan dan dipengaruhi oleh interaksi antar individu.⁴¹

Bermula dari perspektif interaksionisme simbolik, kemudian muncul beberapa perspektif baru yang menjadi bagian dari arus perspektif tersebut, salah satunya berasal dari Erving Goffman dengan perspektif dramaturgi-nya. Terlepas dari munculnya keraguan dari beberapa pihak untuk mengklasifikasikan karyanya sebagai representasi murni dari perspektif interaksionisme simbolik, tema-tema interaksionisme simbolik ditemukan di seluruh karya Goffman diantaranya, simbol, makna bersama, dan identitas.⁴² Pada analisis yang dilakukan, dramaturgi memiliki kepentingan utama untuk mendeskripsikan kehidupan sosial sehari-hari sebagai “drama” dan memahami bagaimana individu berusaha memenuhi kebutuhan sosial psikologis di bawah kondisi tersebut.⁴³ Goffman mengiaskan dunia sebagai panggung sandiwara di mana setiap individu menjadi aktor yang berperan dalam hubungan sosial representasi yang patuh pada aturan yang baku.

Dalam panggung sandiwara yang dianalogikan oleh goffman, diri sang aktor harus mempunyai kapabilitas untuk menampilkan “kesan realitas” kepada diri aktor lain agar dapat meyakinkan gambaran atau citra yang hendak disampaikan.⁴⁴ Hal

⁴⁰ Deddy Mulyana (2010), ‘Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya’, dalam Umiarso Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik hingga Modern* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 208

⁴¹ Ari Cahyo Nugroho, *op.cit.* hlm. 192

⁴² Michael J Carter dan Celene Fuller, *op.cit.* hlm. 9

⁴³ Umiarso Elbadiansyah, *op.cit.* hlm. 247

⁴⁴ Umiarso Elbadiansyah, *op.cit.* hlm. 251

tersebut, sejalan dengan gagasan *the looking-glass self* Charles Horton Cooley, yang menyatakan bahwa perkembangan konsep diri seseorang ditentukan oleh cara mereka membayangkan citra diri mereka menurut orang lain. Menghasilkan kesan yang baik kepada orang lain menjadi prioritas bagi sang aktor, itulah sebabnya dia terlibat dalam proses manajemen kesan (*impression management*). Dramaturgi adalah sebuah konsep yang menggambarkan seorang aktor yang secara aktif berusaha untuk membentuk persepsi orang lain terhadapnya. Aktor melakukan ini dengan menampilkan diri dan citra terbaiknya untuk membantunya mencapai tujuan tertentu.⁴⁵

Dalam mendeskripsikan tindakan manusia, Goffman memakai analogi drama dan teater yang selaras dengan pandangan dramaturgi yang lebih memfokuskan pada makna aktivitas manusia yang tergambar dalam cara sang aktor mengekspresikan diri dalam interaksi dengan diri aktor lain yang ekspresif. Dramaturgi menekankan pada dimensi ekspresif atau impresif aktivitas manusia, oleh karena perilaku manusia yang ekspresif maka seraya bersifat dramatik. Dari aspek ini muncul terminologi “peran sosial” sebagai ekspektasi sosial yang dimainkan seseorang dan suatu situasi untuk memberikan citra tertentu kepada khalayak yang hadir.⁴⁶ Individu dinilai mampu menyajikan suatu “pertunjukan” apa pun bagi orang lain, namun perihal kesan (*impression*) yang diperoleh tetap tidak dapat ditentukan dan beragam.⁴⁷

Selayaknya sebuah pertunjukkan teater, Goffman membagi kehidupan sosial manusia pada 2 wilayah. *Pertama*, yaitu *front stage* (panggung depan) yang merupakan wilayah yang ditonton oleh khalayak. Pada wilayah ini, seseorang menampilkan peran formal atau berperan layaknya aktor. Panggung depan meliputi *setting*, *personal front* (penampilan diri), *expressive equipment* (peralatan untuk mengekspresikan diri), kemudian terbagi lagi menjadi *appearance* (penampilan) dan *manner* (gaya). *Kedua*, *back stage* (panggung belakang) yang merupakan tempat bagi individu untuk memunculkan siapa dirinya, bersantai, dan mempersiapkan perannya di panggung

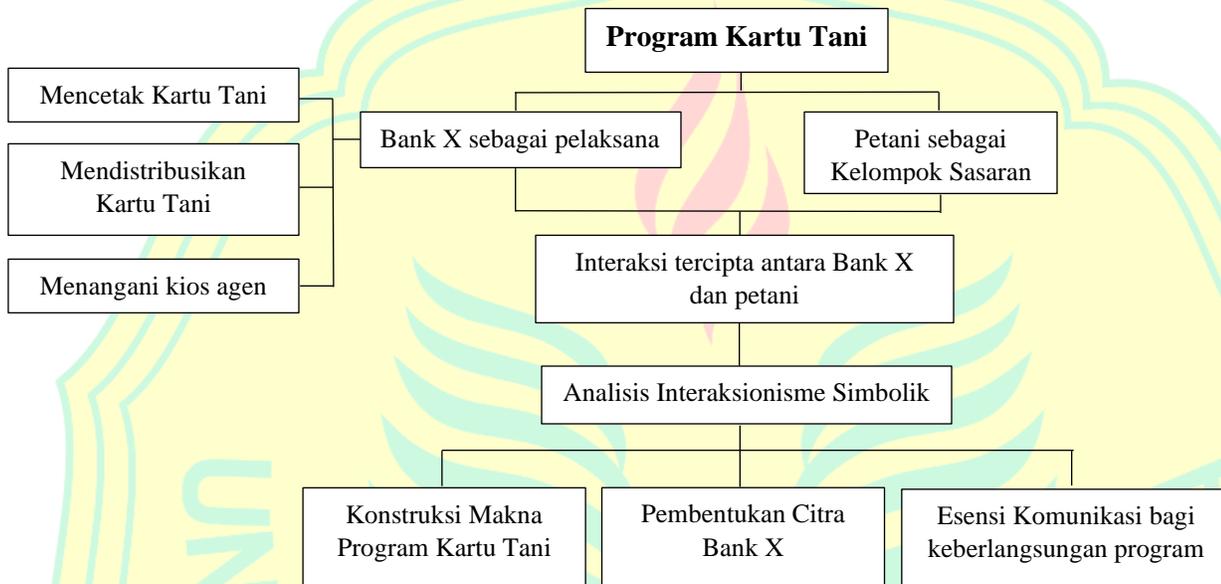
⁴⁵ Umiarso Elbadiansyah, *op.cit.* hlm. 255-256

⁴⁶ Umiarso Elbadiansyah, *op.cit.* hlm. 259

⁴⁷ Umiarso Elbadiansyah, *op.cit.* hlm. 257

depan. Di sini, dilakukan semua kegiatan tersembunyi untuk melengkapi keberhasilan aktor dalam ber-akting atau menampilkan diri mereka pada panggung depan.⁴⁸

Skema 1. 1 Hubungan Antar Konsep



Sumber: Hasil Analisa Peneliti (2023)

1.7. Metodologi Penelitian

Penelitian ini melakukan penelitian kualitatif, yang mengeksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, serta menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan, melakukan analisis induktif terhadap data, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan kemudian memberikan interpretasi tentang suatu makna data. Kemudian, kegiatan akhirnya adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel.⁴⁹

⁴⁸ Umiarso Elbadiansyah, *op.cit.* hlm. 259-260

⁴⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 3-4

Studi kasus adalah metode kualitatif di mana peneliti menyelidiki satu atau lebih kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam. Metode ini menggunakan berbagai sumber informasi, seperti observasi, wawancara, materi audiovisual, dokumen, dan laporan, dan kemudian mendeskripsikan kasus dalam laporan. Misalnya, beberapa program atau sebuah dapat dipilih sebagai studi.⁵⁰ Maka, berdasarkan hal tersebut, peneliti hendak menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terkait dengan pelaksanaan Program Kartu Tani di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

1.7.1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi Program Kartu Tani. Dalam hal ini terdapat 8 informan, yang terdiri dari 2 PIC Program Kartu Tani PT Bank X dan 6 Petani penerima Kartu Tani di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Tabel 1. 4 Subjek Penelitian

No	Nama Informan	Pendidikan	Usia	Jabatan/Pekerjaan
1.	Bapak M	SMA	24	PIC Program Kartu Tani PT Bank X area Kab. Bekasi
2.	Ibu I	D4	24	PIC Program Kartu Tani PT Bank X area Kab. Bekasi
3.	Bapak W	3 SD	45	Ketua Poktan Harapan Jaya, Desa Sumberjaya
4.	Bapak N	SD	50	Petani Desa Sumberjaya
5.	Bapak R	SD	50	Petani Desa Sumberjaya
6.	Bapak J	SMP	42	Petani Desa Sumberjaya
7.	Bapak S	SD	45	Petani Desa Sumberjaya
8.	Bapak Y	SMP	37	Petani Desa Sumberjaya

⁵⁰ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*, (California: Sage Publication, 2007), hlm. 73

1.7.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulisan ini berlangsung selama kurang lebih enam bulan yaitu terhitung sejak awal bulan Agustus 2022 hingga akhir Januari 2022. Data yang dibutuhkan peneliti berada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

1.7.3. Peran Peneliti

Peneliti berperan sebagai aktor dalam kegiatan penulisan. Peneliti terjun langsung ke lapangan, melakukan observasi, pencarian data, dan melakukan wawancara langsung dengan informan terkait. Peneliti berupaya untuk mengungkapkan pelaksanaan Program Kartu Tani beserta manfaat dan kendalanya bagi Bank X sebagai pelaksana dan bagi petani sebagai penerima manfaat. Kemudian, peneliti akan menyusun laporan hasil temuan secara sistematis dan informatif bagi pembaca.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mencari data.⁵¹ Dengan melihat dari cara pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.⁵² Peneliti melakukan observasi partisipatif dengan terlibat dalam kegiatan sehari-hari subjek atau sumber data penelitian.⁵³ Observasi dilakukan peneliti untuk melakukan pengamatan secara menyeluruh berlangsungnya program Kartu Tani. Peneliti melakukan observasi dengan berkontribusi langsung dalam pelaksanaan

⁵¹ Sugiyono, *op.cit.* hlm. 104

⁵² Marshall dalam Sugiyono, 2018, hlm. 106

⁵³ Sugiyono, *op.cit.* hlm. 106

program Kartu Tani yang dilakukan oleh pihak Bank X Area Bekasi Juanda dalam hal tahapan penyaluran Kartu Tani dan pengelolaan kios agen.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pengetahuan atau keyakinan pribadi, adalah dasar dari teknik pengumpulan data ini.⁵⁴ Wawancara dilakukan pada informan yang sudah ditentukan oleh peneliti dengan cara *face-to-face* atau bertatap langsung setelah adanya observasi. Dalam wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi dan fakta yang diperlukan bagi penelitian.

Peneliti melakukan wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur kepada para narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai PIC Program Kartu Tani Bank X Area Bekasi Juanda yang berjumlah 2 orang dan juga petani penerima Kartu Tani di Desa Sumberjaya yang berjumlah 4 orang, salah satunya merupakan ketua kelompok tani.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tentang peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Contoh dokumen tulisan termasuk catatan harian, sejarah kehidupan (biografi), ceritera, dan peraturan kebijakan; dokumen gambar, seperti foto, sketsa, dan lain-lain; dan dokumen karya seni, seperti patung, gambar, film, dan sebagainya. Proses observasi dan wawancara yang digunakan peneliti dilengkapi dengan studi dokumen.⁵⁵ Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data berupa dokumen terkait dengan pelaksanaan program Kartu Tani oleh PT Bank X yang diperoleh dari informan dan

⁵⁴ Sugiyono, *op.cit.* hlm. 114

⁵⁵ Sugiyono, *op.cit.* hlm. 124

dokumentasi pribadi yang peneliti peroleh selama berkontribusi pada pelaksanaan program maupun pada saat pengumpulan data.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, teknik selanjutnya adalah pengolahan data. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai data menjadi jenuh. Aktivitas dalam analisis data adalah (1) *data reduction*; (2) *data display*; dan (3) *conclusion drawing/verification*.⁵⁶

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari saat diperlukan.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, diagram flowchart, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) "*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c) *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika

⁵⁶ Huberman dalam Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 132-142

kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan awal tersebut dapat dianggap kredibel.

1.7.6. Triangulasi Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, maka sebenarnya pengumpulan data itu sudah sekaligus dengan menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam hal ini, Triangulasi data dilakukan dengan mencocokkan jawaban antar informan serta menambah informan dari Ibu E selaku Koordinator Penyuluh (Korlu) BPP Kecamatan Tambun Selatan dan Bapak U selaku Ketua Penyuluhan Pertanian Swadaya (PPS) Desa Sumberjaya. Triangulasi kepada pihak BPP dan PPS dilakukan karena mereka juga berperan terhadap terlaksananya program Kartu Tani dan mengetahui pelaksanaan program tersebut di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

1.8. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Satu bab pertama yaitu berupa pendahuluan, kemudian dua bab empiris, lalu satu bab analisis, dan satu bab kesimpulan. Pada **BAB I** terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep dan teori, serta metodologi penelitian. Kemudian, dalam **BAB II** yaitu gambaran umum yang terdiri dari pemaparan tentang program Kartu Tani, Bank X sebagai pelaksana program Kartu Tani, Divisi Bansos Kartu Tani Bank X, petani di Desa Sumberjaya, dan profil informan. Selanjutnya, dalam **BAB III** yaitu berisi data yang ditemukan di lapangan tentang pelaksanaan Program Kartu Tani oleh PT Bank X di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan.

Lalu, pada **BAB IV** akan menganalisis hasil temuan data dengan teori interaksionisme simbolik. Terakhir, **BAB V** berisi kesimpulan dan saran.

